



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 144/360/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENANGANAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TAHUNA,
KECAMATAN TAHUNA TIMUR DAN KECAMATAN MANGANITU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur dan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 11 Mei 2019, maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana selama masa status keadaan darurat bencana yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan kajian di lokasi bencana, ternyata masih diperlukan penanganan sehingga Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 134 / 360 / Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur dan Kecamatan Manganitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur dan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Posedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; ff

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur dan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Penetapan Status Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA